**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Siswa adalah unsur terpenting dari pendidikan, tanpa siswa pendidikan itu tidak ada. Karena itu, segala aktivitas pendidikan harus berorientasi pada siswa. Artinya, pelaksanaan pendidikan harus ditujukan dalam rangka membantu mengoptimalkan perkembangan siswa baik jasmani maupun rohani. Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip Abuddin Nata, mengemukakan bahwa ”pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan".[[1]](#footnote-2) Pandangan Ki Hajar Dewantara di atas menekankan bahwa usaha pendidikan harus dilakukan secara sadar dan bertujuan yaitu untuk mengantarkan manusia pada keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan berkaitan dengan kondisi jasmani, sedang kebahagiaan berkaitan dengan aspek rohani. Ini menunjukkan bahwa usaha pendidikan harus dilakukan secara komprehensif untuk melatih jasmani dan membimbing rohani peserta didik agar keselamatan dan kebahagiaan tercapai. Dengan kata lain, pendidikan harus meliputi seluruh aspek perkembangan peserta didik.

Diantara aspek perkembangan peserta didik yang harus diperhatikan adalah pembinaan akhlak. Demikian itu, karena akhlak merupakan representasi yang paling konkrit dari keperibadian. Pribadi yang baik dapat diukur dari akhlaknya yang baik, sebaliknya akhlak yang buruk dan perilaku yang menyimpang menunjukkan keperibadian yang buruk.

Demikian pentingnya pembinaan akhlak sehingga dalam rumusan tujuan pendidikan nasional dinyatakan secara eksplisit bahwa diantara unsur kompetensi peserta didik yang harus dibentuk melalui usaha pendidikan adalah terbentuknya akhlak mulia. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.[[2]](#footnote-3)

Rumusan tujuan pendidikan di atas, selanjutnya menjadi acuan dan dasar pijakan bagi pelaksanaan program pendidikan nasional terutama lembaga-lembaga pendidikan formal yang dalam hal ini adalah sekolah. Dengan demikian, maka segala aktivitas pendidikan di sekolah harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas, yang antara lain amanatnya adalah membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah.

Dalam usaha merealisasikan tujuan pendidikan nasional di atas, sekolah menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk kegiatan baik melalui proses pembelajaran di kelas, juga melalui instrumen-instrumen pembinaan lainnya, diantaranya adalah melalui penerapan disiplin sekolah. Disiplin sekolah, pada pokoknya untuk mengendalikan perilaku semua unsur-unsur sekolah guna menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah dalam suasana kondusif.

Disisi lain, disiplin sekolah sebagai bentuk pengendalian perilaku, juga dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pendidikan. Disiplin dalam hal ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik agar patuh dan taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dan perilaku tertib adalah bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sikap patuh terhadap aturan dan perilaku tertib akan menjamin peserta didik dapat melakukan interaksi sosial secara wajar dan menjadi bekal bagi peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab di kemudian hari. Sebaliknya, sikap membangkang terhadap aturan dan perilaku yang melawan hukum dapat merusak citra diri individu hingga ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya atau kurang mendapat penerimaan dari lingkungannya.

Kepatuhan terhadap aturan adalah sesuatu yang harus dilatihkan di sekolah. Sekolah sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat harus dapat melatih siswa sebagai subjek didiknya agar menjadi manusia yang taat pada aturan. Sikap patuh dan perilaku taat hukum tersebut dapat dilatih di sekolah melalui penerapan disiplin.

Disiplin hakikatnya adalah kesadaran yang sudah tertanam dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku yang sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Menurut Poerwadarminta “Disiplin adalah latihan hati dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib”.[[3]](#footnote-4) Senada dengan itu, Singgih D. Gunarsa menjelaskan bahwa ”fungsi utama dari disiplin adalah untuk belajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas”.[[4]](#footnote-5) Konsepsi disiplin tersebut menunjukkan bahwa melalui disiplin, para siswa didorong untuk mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan tata tertib dan aturan yang ada. Dengan pengertian ini, maka siswa yang disiplin adalah siswa yang tidak berucap dengan ucapan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Siswa disiplin adalah siswa yang menjaga perilakunya agar tidak menjurus ke hal-hal negatif yang menyimpang dari aturan dan tata tertib yang ada.

Berangkat dari konsep disiplin seperti telah diuraikan di atas, maka upaya penerapan disiplin sekolah pada dasarnya adalah bentuk pengendalian perilaku siswa agar sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Dengan demikian, maka penerapan disiplin sangat urgen dalam usaha pembentukan akhlak siswa, mengingat akhlak berkaitan erat dengan perilaku siswa sehari-hari. Untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah, siswa harus memiliki kemampuan mengendalikan diri dari kecenderungan terhadap hal-hal yang negatif. Hal ini berarti, spirit penerapan disiplin sekolah sangat mendukung usaha pembinaan akhlak siswa. Dalam hal ini, Hurlock mengemukakan bahwa penerapan disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial.

Dalam pelaksanaannya, untuk menegakkan disiplin di sekolah perlu ditunjang oleh seperangkat peraturan yang secara organisasi mengikat setiap komponen sekolah baik siswa, guru maupun kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperangkat peraturan atau ketentuan dimaksud disebut dengan disiplin sekolah atau tata tertib sekolah.

Menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah haruslah dimulai dari unsur sekolah itu sendiri, terutama oleh kepala sekolah dan guru. Demikian itu, karena disiplin lebih terkait dengan pembentukan sikap mental dan keteladanan sehingga guru memegang peranan penting dan strategis dalam hal ini. Disisi lain, siswa lebih banyak mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang disiplin dengan cara mengamati tingkah laku figur-figur penting di sekitarnya, yang dalam hal ini adalah guru. Karena itu, guru harus mampu menjadi ”*modelling”* bagi penerapan disiplin itu sendiri.

Dari uraian ini, penulis dapat menggaris bawahi dua poin penting berkaitan dengan penerapan disiplin dalam pembinaan akhlak siswa yaitu bahwa (1) agar disiplin dapat benar-benar efektif dalam membina dan mengendalikan tingkah laku (akhlak) siswa maka perangkat aturan yang menjadi acuannya harus dirumuskan secara baik dan berorientasi edukatif, (2) disiplin membutuhkan strategi penerapan yang tepat, artinya penerapan disiplin tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Kedua poin tersebut, dapat disederhanakan bahwa yang pertama berkaitan dengan konten (isi) atau bentuk-bentuk disiplin itu sendiri dan yang kedua berkaitan dengan cara penerapan (strategi penerapan).

Dalam kenyataannya, setiap sekolah mempunyai aturan atau disiplin sendiri dalam menertibkan siswanya. Pada dasarnya setiap disiplin sekolah dimaksudkan untuk tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan perilaku siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Meski memiliki tujuan yang sama, namun penerapan disiplin yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pula bagi siswa. Tidak jarang ditemukan disiplin yang diterapkan secara kaku justru membuat siswa jadi lebih agresif melakukan tindakan negatif. Disiplin permisif juga dapat membuat siswa merasa seenak hatinya untuk melakukan apapun yang dikehendaki tanpa mempertimbangkan efek positif atau negatifnya.

Dalam pengamatan sekilas di SMPN 1 Lantari Jaya, penulis melihat bahwa perilaku negatif yang tidak mencerminkan akhlak terpuji masih sering terjadi. Beberapa diantaranya adalah adanya siswa yang merokok di sekolah, rendahnya penghormatan terhadap guru, bolos belajar, keliaran pada jam belajar, dan lain-lain. Fenomena tersebut jelas menunjukkan bahwa penerapan disiplin sekolah di SMPN 1 Lantari Jaya belum sepenuhnya dapat menghindarkan siswa dari perilaku menyimpang. Dari sini, sejumlah dugaan kiranya patut untuk dikemukakan dalam menyingkap apa sesungguhnya yang menjadi penyebab, antara lain: adakah hal tersebut terjadi karena disiplin sekolah tidak ditegakkan, ataukah mungkin diterapkan dengan cara yang kurang tepat. Hal lainnya, yang juga dapat diduga sebagai penyebab adalah mungkin saja penerapan disiplin tidak berhasil karena adanya berbagai kendala.

Bertolak dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana sesungguhnya penerapan disiplin sekolah di SMPN 1 Lantari Jaya. Hal inilah yang mengilhami penulis untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan topik ”penerapan disiplin dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dibatasi pada“penerapan disiplin dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana”.

1. **Rumusan Masalah**

Selanjutnya, fokus penelitian di atas dapat diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan disiplin siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana dampak penerapan disiplin dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin siswa di SMPN 1 Lantari Jaya?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penerapan disiplin siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana
2. Untuk mendeskripsikan dampak penerapan disiplin dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN 1 Lantari Jaya Kabupaten Bombana
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin siswa di SMPN 1 Lantari Jaya
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual para civitas akademika di bidang pendidikan dalam usaha menggalakkan berbagai cara alternatif pembinaan akhlak siswa, yang antara lain dapat dilakukan melalui penerapan disiplin di sekolah.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting kepada pengelola lembaga (sekolah) dalam rangka membangun regulasi untuk mendisiplinkan siswa
2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran tentang pentingnya pembinaan akhlak melalui penerapan disiplin sekolah
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan informasi awal untuk dilakukan kajian secara lebih komprehensif
4. **Definisi Operasional**

Dalam rangka menyatukan persepsi dalam memaknai maksud penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha sekolah dalam mengendalikan perilaku siswa melalui penerapan aturan dan tata tertib sekolah sebagai pedoman perilaku siswa demi mewujudkan suasana tertib dan nyaman dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penerapan disiplin disini, akan dilihat dari penegakan tata tertib sekolah seperti siswa masuk sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, tertib dalam belajar, dan juga penerapan hukuman bagi siswa yang melanggar.
2. Pembinaan akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian tindakan pembinaan yang dilakukan oleh guru di sekolah dalam rangka membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moral ajaran agama (akhlakul karimah) melalui penegakkan disiplin sekolah.
1. Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan Nasional RI, Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 231 [↑](#footnote-ref-4)
4. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Pembimbing,* (Jakarta : BBPK, Gedung Mulia, 2000), cet. IX, h. 138. [↑](#footnote-ref-5)